

**RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN**  
**(Simulasi Mengajar Guru Penggerak Angkatan 4)**

Nama Guru : **Akhirul Fathoni**  
Satuan Pendidikan : SMA Negeri 1 Purwantoro  
Email : akhirulfathoni@gmail.com  
Kelas / Semester : XI / 2 (Genap)  
Tema : Perpajakan  
Sub Tema : Fungsi Pajak  
Pembelajaran ke- : 2 (dua)  
Alokasi Waktu : 10 menit

**A. KOMPETENSI INTI**

- KI 3. Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
- KI 4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

**B. KOMPETENSI DASAR**

<b>Kompetensi Dasar</b>	<b>Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)</b>
3.7 Menganalisis perpajakan dalam pembangunan ekonomi.	3.7.1 Menyebutkan fungsi pajak 3.7.2 Menjelaskan fungsi pajak 3.7.3 Menerapkan fungsi pajak dalam pembangunan ekonomi 3.7.4 Menganalisis fungsi pajak dalam pembangunan ekonomi 3.7.5 Menyimpulkan fungsi pajak dalam pembangunan ekonomi

Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)
4.7 Menyajikan hasil analisis fungsi dan peran pajak dalam pembangunan ekonomi.	4.7.1 Menyajikan hasil analisis fungsi pajak dalam pembangunan ekonomi

### C. TUJUAN PEMBELAJARAN

Di awali dengan mengkaji berbagai sumber belajar, melalui pendekatan saintifik dengan model pembelajaran *Discovery Learning*, peserta didik dapat menganalisis fungsi pajak dalam pembangunan ekonomi dan menyajikan hasil analisa fungsi pajak dalam pembangunan ekonomi dengan penuh tanggung jawab, mandiri, percaya diri, bekerjasama dan bekerja keras.

### D. KEGIATAN PEMBELAJARAN

TAHAP	LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN	ALOKASI WAKTU
KEGIATAN PENDAHULUAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Guru membuka pembelajaran dengan salam dan mengajak untuk senantiasa bersyukur</li> <li>▪ Guru memeriksa kehadiran peserta didik, kebersihan kelas (PLH) dan menyiapkan fisik dan psikis peserta didik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran</li> <li>▪ Guru membangun apersepsi dengan mengemukakan ilustrasi perpajakan untuk menarik perhatian siswa dan rasa ingin tahu</li> <li>▪ Guru menyampaikan topik perpajakan dan mengajukan pertanyaan keterkaitan dengan materi pembelajaran sebelumnya</li> <li>▪ Guru menyampaikan pokok-pokok materi yang akan dipelajari serta tujuan pembelajaran yang akan dicapai</li> </ul>	2 Menit
KEGIATAN INTI	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Guru membagi kelas menjadi 4 kelompok</li> <li>▪ Peserta didik diberikan motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada materi <i>fungsi pajak</i> melalui pemaparan awal guru dan atau video pada link <a href="https://www.youtube.com/watch?v=CaZ8-ArwiCc">https://www.youtube.com/watch?v=CaZ8-ArwiCc</a> dan mengumpulkan beberapa pertanyaan terkait materi yang dibahas.</li> </ul>	6 Menit

TAHAP	LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN	ALOKASI WAKTU
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peserta didik mengumpulkan data informasi dari beberapa referensi dengan melakukan diskusi dan saling tukar informasi dengan peserta didik lainnya secara berkelompok tentang <i>fungsi pajak</i></li> <li>▪ Peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi mengolah data dari berbagai sumber belajar dan melakukan verifikasi terhadap informasi yang didapatkannya tentang <i>fungsi pajak</i></li> <li>▪ Setiap kelompok menyampaikan hasil diskusi (presentasi) tentang materi <i>fungsi pajak</i> dan membuka kesempatan diskusi antar kelompok (bertukar informasi), dan guru memberikan penguatan atas hasil diskusi</li> </ul>	
KEGIATAN PENUTUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peserta didik membuat resume hasil kegiatan pembelajaran tentang materi <i>fungsi pajak</i>.</li> <li>▪ Guru melakukan refleksi tentang kegiatan pembelajaran pertemuan ini</li> <li>▪ Guru menyampaikan point materi yang akan disampaikan pada pertemuan berikutnya disertai himbauan dan motivasi untuk selalu belajar</li> <li>▪ Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan berdoa dan salam.</li> </ul>	2 Menit

#### E. PENILAIAN

NILAI UNSUR	SIKAP	PENGETAHUN	KETERAMPILAN
JENIS/TEKNIK	Observasi: sikap religius dan sosial	Tertulis/lisan/penugasan	Praktik/Performance, portofolio
BENTUK	Lembar pengamatan	PG/uraian/quiz	Lembar penilaian keterampilan
INSTRUMEN	Terlampir	Terlampir	Terlampir

## TINDAKLANJUT HASIL PENILAIAN

1. Remedial	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Pembelajaran remedial dilakukan bagi peserta didik yang belum tuntas dalam pencapaian KD</li><li>▪ Tahapannya dilaksanakan melalui remedial teaching (klasikal), atau tutor sebaya, atau tugas, dan diakhiri dengan tes.</li><li>▪ Tes remedial dilakukan sebanyak 3 kali dan apabila 3 kali tes remedial belum mencapai ketuntasan, maka remedial dilakukan dalam bentuk tugas tanpa tes</li></ul>
2. Pengayaan	Bagi peserta didik yang sudah mencapai nilai ketuntasan diberikan pembelajaran pengayaan



Mengetahui  
Kepala SMA Negeri 1 Purwanto

**DWI SWATUN HASANAH, S.Pd., M.Pd.**

Pembina Tk.I  
NIP. 19760730 200112 2 003

Guru Mata Pelajaran

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A. Fathoni'.

**AKHIRUL FATHONI, S.E.**  
NIP. 19840218 200903 1 003

## Lampiran 1: *Bahan Ajar*

# BAHAN AJAR

### Sumber Belajar:

1. **Buku Paket Ekonomi Kelas XI Kurikulum 2013 dari berbagai penerbit**
2. **Artikel/Berita Perpajakan**
3. **Video tentang perpajakan**

## FUNGSI PAJAK

Dengan mengetahui apa itu pajak dan manfaatnya, perlu juga untuk diketahui apa saja fungsi dari pajak. Selain untuk pembangunan, pajak juga memiliki manfaat untuk pembiayaan penegak hukum, keamanan negara, pekerjaan publik, subsidi dan biaya operasional lainnya. Fungsi pajak dibagi menjadi empat yaitu:

### 1. Fungsi anggaran atau budgeter

Pajak adalah sumber pendapatan negara yang nantinya akan digunakan untuk pengeluaran negara. Sumber pemasukan ini dilakukan dengan cara pengumpulan dana dari Wajib Pajak ke kas negara yang digunakan untuk pembangunan nasional dan pengeluaran negara yang lainnya. Negara harus memastikan bahwa pengeluaran dan pendapatan negara dari uang pajak seimbang. Di Indonesia, pajak merupakan kontributor terbesar pendapatan negara. Pajak digunakan untuk membiayai anggaran yang berkaitan dengan pembangunan dan kepentingan negara.

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Pajak digunakan untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Contoh fungsi pajak ini adalah menyediakan fasilitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan pelayanan publik lainnya.

### 2. Fungsi mengatur atau regulasi

Selain fungsi anggaran, pajak juga memiliki fungsi regulasi, fungsi yang mengatur pertumbuhan ekonomi. Dengan kebijakan dari pemerintah, dana dari pajak digunakan untuk membantu perekonomian negara. Melalui pajak, pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.

Misalnya untuk perlindungan produksi di dalam negeri, pemerintah meningkatkan harga bea masuk produk-produk yang berasal dari luar negeri. Dengan demikian, masyarakat tidak khawatir lagi dengan kompetisi harga dengan produk-produk luar negeri.

### 3. Fungsi Pemerataan atau Distribusi

Pajak juga digunakan oleh negara untuk pemerataan kesejahteraan melalui bantuan dana, jaminan kesehatan dan fasilitas umum. Pajak juga bisa digunakan untuk membiayai kepentingan umum sehingga bisa menciptakan banyak lapangan pekerjaan baru yang di mana akan berakhir dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Terbukanya lapangan pekerjaan dapat mendistribusi pendapatan masyarakat secara merata.

### 4. Fungsi stabilisasi

Selain tiga fungsi di atas, pajak memiliki fungsi sebagai stabilisasi. Pajak memainkan peran penting untuk menjaga keseimbangan perekonomian suatu negara. Stabilisasi yang dimaksud adalah untuk menstabilkan perekonomian negara. Salah satunya adalah masalah inflasi atau deflasi. Untuk mengurangi inflasi, pemerintah akan mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi peredaran uang. Sedangkan untuk deflasi pemerintah akan menambah peredaran uang. Dengan pajak yang tinggi, jumlah uang yang beredar bisa berkurang sehingga tidak terjadi inflasi. Sedangkan di sisi lain, pemerintah akan menurunkan pajak sehingga jumlah uang yang beredar meningkat dan bisa mengatasi deflasi. Fungsi pajak satu ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien

## ARTIKEL

*Sumber: [www.online-pajak.com](http://www.online-pajak.com)*

# Manfaat Pajak: Melihat Kontribusi Nyata Anda dalam Pembangunan Nasional

- OLEH RANI MAULIDA
- SEPTEMBER 1, 2018



## Manfaat Pajak Masih Kurang Dipahami

Manfaat pajak penting diketahui masyarakat luas agar terjadi peningkatan kepatuhan pajak. Sebab, masih banyak orang yang belum mengenal manfaat pajak.

Pada dasarnya, tingkat kepatuhan pajak terus membaik dari tahun ke tahun. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya wajib pajak yang melaporkan SPT.

Menurut data Direktorat Jenderal Pajak (DJP), persentase laporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pada maret 2018 lalu naik hingga 14,01% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Pada tahun ini, DJP telah menerima 10.589.648 SPT, sedangkan tahun lalu SPT yang diterima sebanyak 9.288.386.

Sebanyak 10 juta lebih SPT tersebut terbagi dari 993.754 SPT orang pribadi non karyawan, 244.084 SPT badan dan 9.351.810 SPT orang pribadi karyawan.

Dari total jumlah SPT tahunan yang sudah dilaporkan, sebanyak 8,49 juta melakukan pelaporan melalui elektronik. Sisanya dilaporkan secara manual. Dengan adanya data tersebut, tercatat bahwa tingkat kepatuhan lapor pajak sejumlah 59,98% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yakni 55,96%. Artinya persentase tingkat kepatuhan naik 4,02%.

Data tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu, Robert Pakpahan.

Meski tingkat kepatuhan bertambah, namun masih ada sebagian wajib pajak yang terdaftar belum terlalu mementingkan pelaporan pajak. Hal ini berkaitan pula dengan ketidaktahuan masyarakat betapa pentingnya pajak bagi mereka, perekonomian, dan pembangunan negara.

## Manfaat Pajak Secara Umum

**Fungsi Budgeter.** Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Jadi, pajak merupakan pendapatan negara yang berfungsi menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara.

**Fungsi Regulasi.** Pajak menjadi alat untuk mengatur kebijakan sosial dan ekonomi. Pajak dapat digunakan untuk mengatur laju inflasi, mendorong kegiatan ekspor, memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dalam negeri dan menarik investasi .

**Fungsi Distribusi.** Pajak berfungsi mendistribusikan kesejahteraan masyarakat.

**Fungsi Stabilitas.** Berfungsi untuk menstabilkan kondisi perekonomian. Contohnya, untuk mengatasi inflasi pemerintah menetapkan pajak yang tinggi agar jumlah uang beredar dapat dikurangi. Begitu pun ketika negara mengalami kelesuan ekonomi, pemerintah merespon dengan menurunkan pajak sehingga jumlah uang yang beredar bisa meningkat.

## Manfaat Pajak di Indonesia

Nah, setelah mengulas manfaat pajak secara umum, selanjutnya kita akan membahas manfaat pajak secara khusus di Indonesia. Di bawah ini, kita akan melihat ke mana saja alokasi uang pajak yang telah disetorkan wajib pajak. Berikut ini rincian pengalokasian dana pajak pada tahun 2018 seperti dikutip dari situs resmi Kementerian Keuangan RI.

## Alokasi Pajak dalam Anggaran Belanja Pemerintah Pusat

**Pelayanan Umum.** Saat ini total anggaran APBN untuk Pelayanan Umum mencapai Rp435,9 triliun. Dana ini digunakan untuk mempercepat pencapaian dan sasaran pada fungsi pelayanan umum seperti:

- Pengelolaan jumlah PNS mulai dari perekrutan hingga pembayaran gaji.
- Meningkatkan kinerja birokrasi yang efektif dan efisien melalui penerapan Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) pada 623 Instansi Pemerintah (IP).
- Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik lewat implementasi e-government yang terintegrasi pada 623 IP.
- Meningkatkan akuntabilitas kinerja birokrasi melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) pada 581 IP.
- Mendukung manajemen dan pelaksanaan tugas teknis K/L yang berbasis output.

**Pertahanan.** Total anggaran untuk kebutuhan pertahanan mencapai Rp107,8 triliun. Dana tersebut dialokasikan untuk mempercepat capaian dan sasaran yang diharapkan untuk pertahanan negara, di antaranya,

- Terpenuhinya modernisasi Alutsista melalui pengadaan/penggantian 50 unit kendaraan tempur.
- Pengembangan fasilitas dan/atau sarana-prasarana mata laut melalui pembangunan pos pengamanan perbatasan sebanyak 3 dermaga.
- Modernisasi command center Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas).

**Keterlibatan dan Keamanan.** Saat ini, total anggaran APBN untuk kebutuhan Keterlibatan dan Keamanan adalah Rp136 triliun. Alokasi dana tersebut digunakan untuk mencapai sasaran berikut ini:

- Terpenuhinya modernisasi Alutsista melalui pengadaan/penggantian 50 unit kendaraan tempur.
- Pengembangan fasilitas/sarana-prasarana mata laut melalui pengembangan pos pengamanan perbatasan sebanyak 3 dermaga.
- Modernisasi command center Kohanudnas.

**Ekonomi.** Anggaran dalam APBN 2018 untuk sektor ekonomi adalah Rp335,5 triliun. Dana tersebut digunakan untuk pencapaian sasaran ekonomi, di antaranya:

- Pembangunan jalur KA sepanjang 639 kilometer.
- Pembangunan LRT sepanjang 23 kilometer.
- Pembangunan jalan baru sepanjang 832 kilometer.
- Pembangunan 15 bendungan baru dan 92 unit embung baru.
- Pembangunan 15.373 meter jembatan baru.
- Pembangunan 17 pelabuhan laut.
- Pembangunan bandara baru di 8 lokasi.
- Pembangunan 947 kilometer irigasi.
- Penyediaan jaringan tulang punggung serat optik nasional (Palapa Ring) pada 57 kabupaten/kota.
- Penyediaan 70% satelit multifungsi.
- Penyediaan akses Base Transceiver Station (BTS).

**Perlindungan Lingkungan Hidup.** Pada saat ini, anggaran yang tersedia di APBN untuk Perlindungan Lingkungan Hidup mencapai Rp15,7 triliun. Anggaran tersebut akan disalurkan untuk kepentingan seperti berikut ini:

- Pemulihan kawasan konservasi yang terdegradasi secara kolaboratif bersama masyarakat seluas 30.000 hektar.
- Pengembangan infrastruktur keagrariaan seluas 1,5 juta hektar.
- Pengelolaan kolaboratif hutan konservasi bersama masyarakat di kawasan hutan konservasi taman nasional seluas 70.000 hektar.
- Perlindungan kawasan konservasi baru yang ditetapkan/dicanangkan di tingkat nasional dan daerah seluas 700.000 hektar.
- Rehabilitasi hutan dan lahan kritis pada DAS rawan/pasca bencana secara vegetatif seluas 16.800 hektar.
- Rehabilitasi hutan dan lahan kritis di DAS yang mendukung ketahanan pangan seluas 8.500 hektar.

**Perumahan dan Fasilitas Umum.** Saat ini, anggaran APBN untuk Perumahan dan Fasilitas Umum mencapai Rp31,5 triliun. Dana tersebut dialokasikan untuk:

- Pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan dan pedesaan seluas 2.941 hektar.
- Pembinaan dan pengembangan penyehatan lingkungan permukiman melalui sistem pengelolaan air limbah untuk 489.489 KK.
- Pembinaan dan pengembangan penyehatan lingkungan permukiman melalui sistem pengelolaan drainase di kawasan seluas 392 hektar.
- Pembinaan dan pengembangan penyehatan lingkungan permukiman melalui sistem penanganan persampahan untuk 1.605.565 KK.
- Pembinaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum di 214 kawasan.
- Pembangunan baru rumah swadaya sebanyak 6.000 unit dan peningkatan kualitas rumah swadaya untuk 174.000 unit.

**Kesehatan.** Anggaran kesehatan di APBN mencapai Rp65,1 triliun. Dana ini akan dialokasikan untuk mencapai berbagai sasaran seputar kesehatan, di antaranya:

- Pembinaan gizi masyarakat melalui penyediaan makanan tambahan bagi 460.000 ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) dan penyediaan makanan tambahan bagi 612.900 balita kurus kekurangan gizi.
- Peningkatan mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan bagi rumah sakit di 147 kabupaten/kota dan puskesmas di 2.100 kecamatan.
- Pengembangan pembiayaan kesehatan dan JKN/KIS yang mencakup 92,4 juta jiwa peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).

**Pariwisata.** Saat ini anggaran dalam APBN untuk Pariwisata adalah Rp7,5 triliun. Alokasi ini digunakan untuk mencapai sejumlah sasaran yaitu:

- Terlaksananya pengembangan pendidikan tinggi bidang pariwisata.
- Terlaksananya fasilitas/dukungan perbaikan/peningkatan akses transportasi ke destinasi pariwisata pada 10 destinasi pariwisata prioritas.
- Terlaksananya peningkatan tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat.
- Terlaksananya pengembangan komunikasi pemasaran pariwisata dalam negeri ke mancanegara.

**Agama.** Untuk kepentingan Agama, alokasi APBN mencapai Rp9,5 triliun. Anggaran ini dialokasikan untuk mempercepat pencapaian dan sasaran berupa:

- Meningkatkan pelayanan ibadah haji dalam negeri dan umrah melalui revitalisasi dan pengembangan 8 asrama haji.
- Meningkatkan kualitas pembinaan ibadah haji dan umrah melalui pembinaan 4.090 petugas haji profesional.
- Pemberian tunjangan pada 4.140 penyuluh agama Kristen non-PNS.
- Pemberian tunjangan 3.800 penyuluh agama Katolik non-PNS.

- Pengembangan dan pemberdayaan pada 188 lembaga sosial keagamaan Hindu.
- Peningkatan kualitas 330 rumah ibadah Buddha.

**Pendidikan.** Alokasi APBN untuk Pendidikan saat ini sebesar Rp147,6 triliun. Anggaran ini digunakan untuk pencapaian sejumlah sasaran yakni:

- Meningkatnya akses layanan pendidikan dasar, dengan indikator banyaknya siswa pada jenjang pendidikan dasar dan menengah penerima bantuan Program Indonesia Pintar melalui KIP sebanyak 19,7 juta siswa.
- Tercapainya mahasiswa penerima bantuan Bidik Misi sebanyak 401 ribu mahasiswa.
- Bantuan operasional sekolah (pusat) untuk 8,8 juta siswa.
- Tunjangan profesi guru sebanyak 257 ribu guru PNS.
- Pembangunan dan rehabilitasi 30 ribu ruang kelas.
- Meningkatnya kualitas pembelajaran melalui revitalisasi 75 Lembaga Pendidikan Tenaga Pendidikan (LPTK).
- Pengelolaan/pengembangan 72 PTN baru dan akademi komunitas.

**Perlindungan Sosial.** Anggaran untuk Perlindungan Sosial adalah Rp162,6 triliun. Dana ini akan dimanfaatkan untuk beberapa sasaran, yakni:

- Bantuan tunai bersyarat kepada 10 juta penerima manfaat berdasarkan basis data yang lebih valid dan akuntabel.
- Penyaluran bantuan sosial pangan berupa bantuan sosial rastra dan bantuan pangan non-tunai (BPNT) kepada 15,6 juta penerima manfaat.
- Penyediaan bantuan kelompok usaha ekonomi produktif (KUBE) di wilayah pedesaan bagi 64.700 keluarga miskin.
- Rehabilitas dan perlindungan sosial terhadap balita terlantar/anak jalanan, anak berhadapan hukum dan anak yang mendapatkan perlindungan khusus sebanyak 90.000 anak.

## Lampiran 2: Instrumen Penilaian Sikap

### INSTRUMEN PENILAIAN SIKAP

Nama Satuan pendidikan : SMA Negeri 1 Purwantoro

Tahun Pelajaran : 2020/2021

Kelas/Semester : XI / 2 (Genap)

Mata Pelajaran : Ekonomi

Materi : Perpajakan

NO	WAKTU	NAMA	KEJADIAN/ PERILAKU	BUTIR SIKAP	POS/ NEG	TINDAK LANJUT
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
dst						

Guru Mata Pelajaran

Akhirul Fathoni

**Lampiran 2: Instrumen Penilaian Keterampilan**

**INSTRUMEN PENILAIAN KETERAMPILAN**

Nama Satuan pendidikan : SMA Negeri 1 Purwantoro  
Tahun Pelajaran : 2020/2021  
Kelas/Semester : XI / 2 (Genap)  
Mata Pelajaran : Ekonomi  
Materi : Perpajakan  
Waktu Pembelajaran/Diskusi : .....

No	Nama	Aspek Penilaian				Nilai
		Kerjasama	Komunikatif	Keaktifan	Kritis	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
dst						

Guru Mata Pelajaran

Akhirul Fathoni

**Lampiran 3: Lembar Kerja Kelompok dan Instrumen Penilaian Portofolio Kelompok**

**EMBAR KERJA KELOMPOK**

Nama Satuan pendidikan : SMA Negeri 1 Purwantoro  
 Tahun pelajaran : 2020/2021  
 Kelas/Semester : XI / 2 (Genap)  
 Mata Pelajaran : Ekonomi  
 Materi : Perpajakan  
 Waktu Pembelajaran/Diskusi : .....

NAMA KELOMPOK:

NAMA ANGGOTA:

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- dst

Diskusikan bersama teman kelompokmu tentang Fungsi Pajak.

Fungsi Pajak .....	Deskripsi ..... ..... ..... Contoh Penerapan .....
Dan seterusnya	

**Instrumen Penilaian Portofolio Kelompok**

No	Nama	Aspek Penilaian				Nilai
		Ketetapan	Tata Bahasa	Ilmiah	Temuan Baru	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
dst						

Guru Mata Pelajaran

Akhirul Fathoni

#### Lampiran 4: Instrumen Penilaian Pengetahuan

Nama Satuan pendidikan : SMA Negeri 1 Purwantoro  
Tahun pelajaran : 2020/2021  
Kelas/Semester : XI / 2 (Genap)  
Mata Pelajaran : Ekonomi  
Materi : Perpajakan

#### SOAL URAIAN / TERTULIS

1. Sebutkan fungsi pajak dalam pembangunan ekonomi! (C1)
2. Jelaskan masing-masing dari fungsi pajak! (C2)
3. Bagaimana penerapan fungsi pajak dalam pembangunan ekonomi! (C3)
4. Bagaimana peran dan fungsi pajak dalam pembangunan ekonomi Indonesia selama ini! (C4)
5. Buatlah kesimpulan fungsi pajak dalam pembangunan ekonomi Indonesia! (C4)

#### JAWABAN:

No	Pertanyaan dan Jawaban	Skor
1.	<p>Sebutkan fungsi pajak dalam pembangunan ekonomi!</p> <p><i>Jawaban:</i></p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Fungsi Anggaran</li><li>b. Fungsi Mengatur</li><li>c. Fungsi Distribusi</li><li>d. Fungsi Stabilisasi</li></ol>	3
2.	<p>Jelaskan masing-masing dari fungsi pajak!</p> <p><i>Jawaban:</i></p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Fungsi Anggaran Pajak digunakan untuk membiayai anggaran yang berkaitan dengan pembangunan dan kepentingan negara</li><li>b. Fungsi Mengatur Melalui pajak, pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi dan mencapai tujuan negara</li><li>c. Fungsi Distribusi Pajak juga bisa digunakan untuk membiayai kepentingan umum sehingga bisa menciptakan banyak lapangan pekerjaan baru yang di mana akan berakhir dalam meningkatkan pendapatan masyarakat</li><li>d. Fungsi Stabilisasi Pajak memainkan peran penting untuk menjaga keseimbangan perekonomian suatu negara</li></ol>	5
3.	<p>Bagaimana penerapan fungsi pajak dalam pembangunan ekonomi!</p> <p><i>Jawaban:</i></p>	5

No	Pertanyaan dan Jawaban	Skor
	Pajak merupakan sumber utama dalam penerimaan negara, dimana dari penerimaan tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan ekonomi. Pajak akan difungsikan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, memperluas lapangan kerja, pendidikan dan lainnya, yang semuanya merupakan sumber daya yang dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi,	
4.	<p>Bagaimana peran dan fungsi pajak dalam pembangunan ekonomi Indonesia selama ini!</p> <p><i>Jawaban:</i></p> <p>Apabila berbicara mengenai peran dan fungsi pajak dalam perekonomian, maka akan berkaitan dengan efisiensi ekonomi dan distribusi pendapatan. Kedua aspek tersebut diwujudkan dalam bentuk pembangunan sarana umum seperti pendidikan, Kesehatan, perumahan, dan sebagainya, yang manfaatnya bisa dinikmati oleh masyarakat. Sehingga masyarakat dapat beraktivitas dalam kegiatan ekonomi secara normal, dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Kesejahteraan masyarakat itulah salah satu indikator pembangunan ekonomi</p>	6
5.	<p>Buatlah kesimpulan fungsi pajak dalam pembangunan ekonomi Indonesia!</p> <p><i>Jawaban:</i></p> <p>Pajak merupakan faktor terpenting bagi keuangan negara dalam menjamin keberlangsungann pembangunan nasional tanpa tergantung kepada sumber daya alam dan bantuan asing. Sistem pajak yang efektif akan mampu menggerakkan roda pembangunan ekonomi. Tidak dapat dibayangkan bagaimana kondisi keuangan negara tanpa kontribusi pajak, yang terjadi pembangunan ekonomi tidak dapat dijalankan. Hal ini akan berdampak pada terhambatnya upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.</p>	6

$$\begin{aligned}
 \text{NILAI} &= (\text{Jumlah Skor} \times 4) \\
 &= 25 \times 4 \\
 &= 100
 \end{aligned}$$

Guru Mata Pelajaran

Akhirul Fathoni